



TINDAK LANJUT PERATURAN MENTERI **KEUANGAN NOMOR 212/PMK.07/2022**

TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM
BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
TAHUN ANGGARAN 2023



RENCANA PERUBAHAN PERBUP PENJABARAN

1. Permenkeu No 211/PMK.07/2022
Tentang Perubahan Ketiga Atas
Permenkeu No 139/PMK.07/2019
Tentang Pengelolaan Dana Bagi
Basil, Dana Alokasi Umum, Dan
Dana Otonomi Khusus



2. Permenkeu No 212/PMK.07/2022
Tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian
Dana Alokasi Umum Yang Ditetapkan
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023



DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA



DAU yang Ditetapkan Penggunaannya

DAU Penggajian Formasi PPPK

DAU Pendanaan Kelurahan

DAU Bidang Pendidikan

DAU Bidang Kesehatan

DAU Bidang Pekerjaan Umum

DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK



Penggunaan

Pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 yang **diangkat pada tahun 2023** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

*Tidak termasuk PPPK yang telah lulus dan memperoleh NIP pada tahun 2022 serta tidak termasuk PPPK yang telah diangkat menjadi ASN di Daerah



Indikator Penghitungan

- Jumlah Formasi PPPK
- Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat
- Jumlah Bulan Pembayaran Gaji PPPK



Jumlah Formasi

Dihitung berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh KemenpanRB

Penyaluran DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

	April	Mei - Okt	Nov dan Des
Waktu Penyaluran	Paling cepat tanggal 23 Mei	Paling cepat tanggal 23 bulan berikutnya	Paling cepat tanggal 12 Desember dan paling lambat 2 hari kerja sebelum TA berakhir
Syarat Salur	Laporan Realisasi Bulan April	Laporan Realisasi yang disampaikan secara bulanan	Laporan Realisasi Bulan Nov dan Des
Batas Waktu Penyampaian Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran belanja Pegawai PPPK Formasi 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023	7 Mei	Tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir	Tanggal 7 Desember

DAU EARMARKED PPPK

Alokasi DAU PPPK
50.868.048.000 :

- Pembayaran gaji /tunjangan PPPK formasi 2022 sebanyak 590 orang untuk 11 kali
- gaji/tunjangan PPPK formasi 2023 sebanyak 2652 orang selama 3 bulan

Alokasi gaji/tunjangan
PPPK Perda APBD
127.397.512.600 :

- gaji/tunjangan 2693 orang PPPK lama sejumlah 103.690.521.600
- Gaji/tunjangan 590 orang PPPK formasi 2022 sejumlah 23.706.991.000

Kekurangan DAU P3K
formasi 2023 sekitar
27 s.d. 31 milyar
untuk 2652 orang

Pergeseran anggaran
gaji P3K di
PERGERSERAN APBD

Penyaluran DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK (2)



DAU EARMARKED KELURAHAN

Alokasi DAU
2.200.000.000



Dipetakan
2.220.764.000



Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan di
11 KELURAHAN

ALOKASI TKDD DAU KELURAHAN		2.200.000.000
PEMETAAN EARMARKED		2.220.764.000
NO	SKPD KEL	JADI EARMARKED
1	PANJER	209.000.000
2	SELANG	198.000.000
3	TAMANWINANGUN	196.925.000
4	KEBUMEN	208.559.000
5	BUMIREJO	195.000.000
6	GOMBONG	192.680.000
7	WONOKRIYO	204.600.000
8	JATILUHUR	200.000.000
9	PLARANGAN	217.000.000
10	PANJATAN	199.000.000
11	KARANGANYAR	200.000.000

Penyaluran DAU PENDANAAN KELURAHAN

	Tahap I	Tahap II
Besaran	50%	50%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Bulan Februari	April-Oktober
Syarat Salur	Laporan Rencana Anggaran	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	Paling lambat 17 September	



Penyaluran

*Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 17 September maka DAU tidak akan disalurkan (hangus)

**Harus melewati reviu APIP

***Disalurkan maksimal sebesar pagu alokasi

DAU EARMARKED PENDIDIKAN

Alokasi DAU Pendidikan
100.248.901.000



Dipetakan
100.311.708.200

Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah
20.049.780.200

SUB KEGIATAN PRIORITAS
54.038.182.000

SUB KEGIATAN PENDUKUNG
26.663.389.000

	ALOKASI TKDD DAU PENDIDIKAN	100.248.901.000
N O	PEMETAAN EARMARKED	100.311.708.200
1	Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah paling tinggi sebesar 20% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan.	20.049.780.200
2	SUB KEGIATAN PRIORITAS	34.038.182.000
3	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	46.223.746.000
	RINCIAN DAU EARMARKED PENDIDIKAN	100.311.708.200
1	URUSAN PENDIDIKAN	54.087.962.200
2	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	18.168.460.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPBD)	100.000.000
4	URUSAN TENAGA KERJA	186.152.000
5	URUSAN KEBUDAYAAN	24.181.258.000
6	URUSAN PARIWISATA	1.752.117.000
7	URUSAN PERPUSTAKAAN	504.906.000
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	626.472.000
9	URUSAN PERTANIAN	235.516.000
10	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	468.865.000

DAU EARMARKED KESEHATAN

Alokasi DAU kesehatan
56.839.975.000



Dipetakan
56.859.444.000

Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN
11.367.995.000

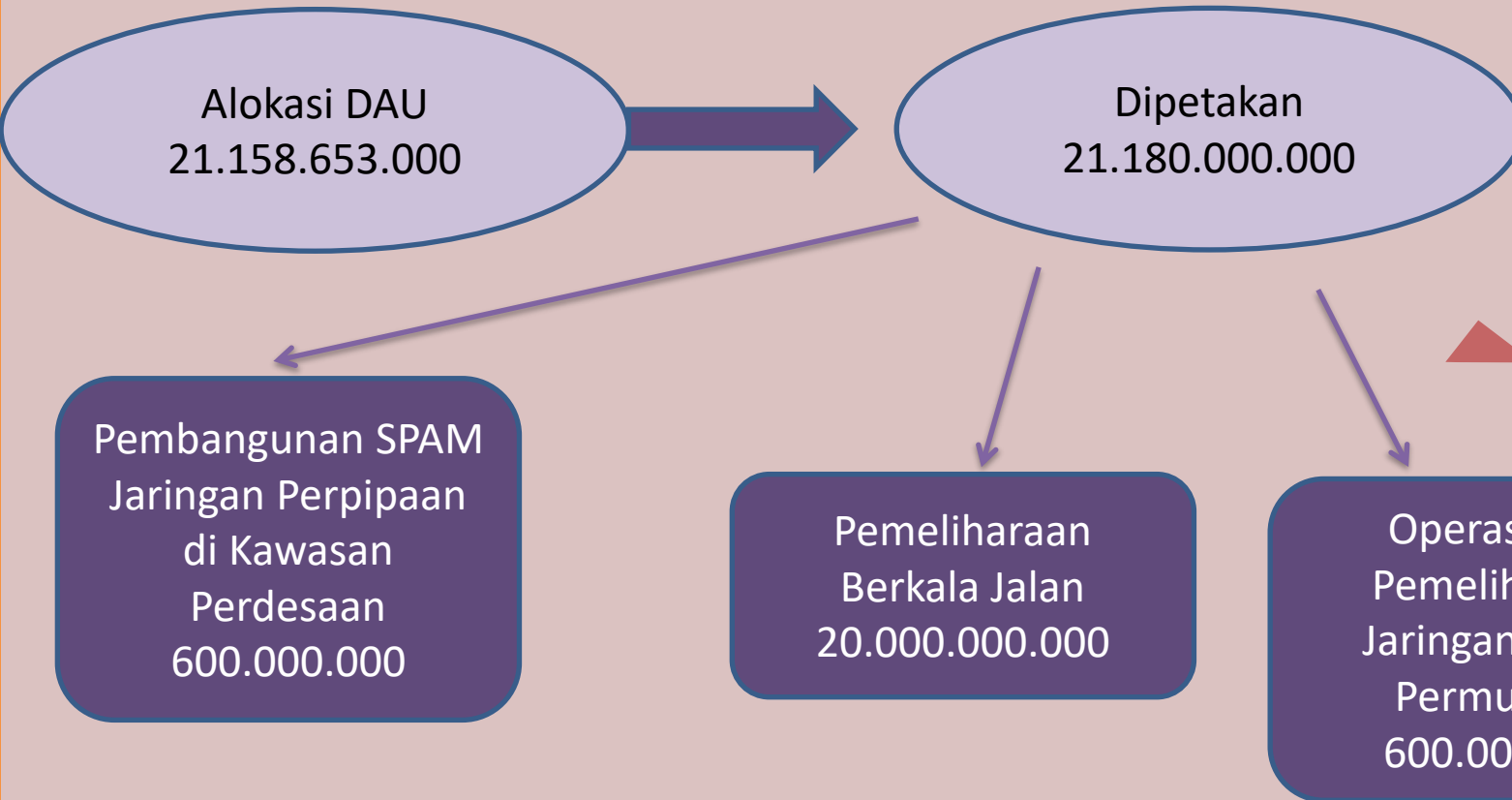
Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional
6.386.345.000

SUB KEGIATAN PRIORITAS
19.764.622.000

SUB KEGIATAN PENDUKUNG
19.762.622.000

	ALOKASI TKDD DAU KESEHATAN	56.839.975.000
	PEMETAAN EARMARKED	56.859.444.000
1	Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan.	11.367.995.000
2	Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan	6.386.345.000
3	SUB KEGIATAN PRIORITAS	19.762.622.000
4	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	19.342.482.000
	RINCIAN DAU EARMARKED	56.859.444.000
1	URUSAN KESEHATAN	37.516.962.000
2	URUSAN KELUARGA BERENCANA	1.492.482.000
3	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (BAGIAN KESRA)	17.850.000.000

DAU EARMARKED PEKERJAAN UMUM



ALOKASI TKDD DAU PEKERJAAN UMUM			21.158.653.000
PEMETAAN EARMARKED			21.180.000.000
NO	SKPD	SUBKEGIATAN	JADI EARMARKED
15	DPUPR	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	180.000.000
41	DPUPR	Pemeliharaan Berkala Jalan	21.000.000.000

Penyaluran DAU BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEKERJAAN UMUM

	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran	30%	45%	25%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Februari	Paling cepat April	Paling cepat Juli
Syarat Salur	Laporan Rencana Anggaran	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 50%	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I dan II min 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	5 Feb – 30 Juni	5 April – 31 Ags	5 Juli – 5 Okt



Penyaluran

*Dalam hal Dokumen persyaratan Tahap I dan/atau tahap II disampaikan melewati batas waktu maka besaran yang disalurkan akan **dipotong sebesar 50%**

Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 5 Oktober maka DAU tahap tersebut **tidak akan disalurkan (hangus)

***Penyaluran dan Dokumen Persyaratan dilakukan terpisah untuk tiap bidang



TERIMAKASIH

